

The Effect of Implementation of the Government's Internal Control System on Fraud Prevention on the Management of Social Assistance Funds in Jambi City

Nabila Azzahra Abas^{1*}, Enggar Diah Puspa Arum², Rahayu³
Jambi University

Corresponding Author: Nabila Azzahra Abas nabilaazzahraabas@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Internal Control, Fraud Prevention, Social Funds

Received : 2 September
Revised : 13 September
Accepted: 20 October

©2023 Abas, Arum, Rahayu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementing the government's internal control system on fraud prevention on the management of social assistance funds in Jambi City. This study is a quantitative research using primary data obtained from questionnaires. The population of this study were all employees in the Inspectorate of Jambi City, namely as many as 56 employees. The sampling technique used purposive sampling with the criteria of employees who are included in the organizational structure and auditors, based on these criteria a total of 34 samples were obtained. The data analysis technique used is SEM-PLS using SmartPLS 3.0. The results showed that only monitoring has an effect on fraud prevention. While control environment, risk assessment, control activities, information and communication had no effect on fraud prevention

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Kota Jambi

Nabila Azzahra Abas^{1*}, Enggar Diah Puspa Arum², Rahayu³

Universitas Jambi

Corresponding Author: Nabila Azzahra Abas nabilaazzahraabas@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud, Bantuan Sosial

Received : 2 September

Revised : 13 September

Accepted: 20 October

©2023 Abas, Arum, Rahayu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Inspektorat Kota Jambi yaitu sebanyak 56 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang masuk dalam struktur organisasi dan auditor, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 34 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM-PLS dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pemantauan yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia sudah melangsungkan sejumlah bentuk kegiatan bantuan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, meringankan tanggungan serta membenahi mutu hidup warga yang kekurangan. Bentuk kegiatan pembagian bantuan sosial dalam bentuk dana maupun benda yang dilakukan oleh para pejabat negara memiliki tujuan untuk membuat suatu bentuk kegiatan yang dapat menyejahterakan rakyat. Pada UU Nomor 14 Tahun 2019 mengenai pekerja sosial dipaparkan jika UUD Negara Republik Indonesia serta Pancasila mengutus para pemimpin negara Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab mereka yaitu memberikan perlindungan serta bantuan pada rakyat dari kondisi-kondisi merugikan yang bisa saja muncul (UU Nomor 14 Tahun 2019). Bantuan sosial mencakup berbagai jenis dan tujuan yang menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 diklasifikasikan menjadi enam kategori, antara lain, penanggulangan bencana, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan sosial.

Anggaran bantuan sosial yang dibagikan oleh pemerintah Indonesia sendiri tentunya sangat banyak bahkan kerap mengalami kenaikan. Menteri keuangan dalam APBN KITA melaporkan bahwa pengaktualan belanja bantuan sosial hingga November 2022 mencapai angka Rp. 153,22 triliun atau 107,58 persen dari target pagu APBN. Pada waktu yang sama yaitu tahun 2021, biaya bantuan sosial mencapai angka Rp. 144,82 triliun atau 92,57 persen dari target pagu APBN. Dilihat dari pencapaian angka yang dilaporkan, penyebaran dana bantuan sosial menjadi hal yang mengkhawatirkan sebab penyebarannya dapat digunakan untuk hal lain seperti korupsi yang tentu saja berbeda dengan maksud awal tersedianya dana tersebut, dimana tujuannya ialah untuk mensejahterakan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Salah satu kasus kecurangan (fraud) yang mendapat perhatian signifikan baik dari pemerintah maupun masyarakat umum berkaitan dengan penyalahgunaan dana ialah aksi dari Juliari Batubara, sang mantan menteri sosial serta empat oknum lain yang terkait dengan korupsi bansos di Kementerian Sosial RI. Kasus kecurangan ini terjadi di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, ditengah upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Tindak kecurangan tersebut memiliki jumlah sekitar Rp. 5,9 triliun dan melibatkan pelaksanaan 272 kontrak dalam dua tahap berbeda. Pada tahap awal penyaluran dana bansos, diterima dana sebesar Rp. 8,2 miliar dan pada tahap selanjutnya pencairan bansos sebesar Rp. 8,8 miliar, sehingga total penerimaan dana tersebut sebesar Rp. 17 miliar yang diduga dimanfaatkan untuk pengeluaran pribadi (Octavia, 2020).

BPK membagikan hasil pengawasan performa kerja yang berhubungan dengan pengendalian hibah serta bantuan sosial pada tahun 2020 hingga tahun 2021 (per 30 September 2021) kepada tiga pemerintah daerah diantaranya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Maybrat. Ditemukan sejumlah permasalahan antara lain belum dilaksanakannya pengelolaan akan biaya belanja hibah serta bantuan sosial secara maksimal, belum merancang dan menentukan aturan serta kebijakan yang menjelaskan mengenai unsur-unsur

pengelolaan hibah serta bantuan sosial yang disokong oleh adanya tata cara pengendalian internal yang layak sehingga menjadikan akibat persebaran hibah serta bantuan sosial yang tidak sesuai dengan target (BPK RI, 2021a).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengidentifikasi masalah dan memberikan catatan atas ketidakwajaran terkait pengelolaan dana bansos sebesar Rp.6.778.752.524.200. Sistem pengendalian internal yang tidak memenuhi atau memadai dan ketidakmampuan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam temuan audit merupakan alasan utama atas ketidakwajaran pengelolaan dana bansos ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan rekomendasi kepada kementerian yang berkaitan akan hal tersebut diantaranya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat mengembangkan fungsi dan penjagaan internal mereka dalam perencanaan serta keberlangsungan anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan selama proses berlangsung, kegagalan untuk mencapai hasil, dan meningkatkan akurasi dalam pelaksanaan pengeluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran (BPK RI, 2021b).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2008), SPIP ialah aspek vital untuk dilaksanakan sebab turut mencakup bentuk penjagaan serta penangkalan akan seluruh bentuk kekeliruan baik dilakukan dengan sengaja ataupun tanpa disengaja yang memungkinkan terjadinya masalah yang dapat memunculkan kerugian pada negara. Sistem pengendalian internal adalah sebuah tata cara pada sebuah organisasi guna melakukan pencegahan pada seluruh kegiatan yang boros, curang serta tidak efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Sistem pengendalian internal merupakan keberlangsungan yang integral terhadap seluruh aksi serta aktivitas yang dilaksanakan tanpa henti oleh pemimpin serta seluruh karyawan guna menghadirkan keyakinan yang layak akan tergapainya suatu tujuan organisasi yang dilakukan dengan cara melaksanakan aktivitas yang praktis serta tepat, ketepatan laporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, serta kepatuhan akan peraturan perundang-undangan.

Implementasi SPIP penting dalam mendorong terbentuknya laporan keuangan yang dapat diandalkan. Pelaksanaan SPIP yang berkesinambungan oleh atasan hingga karyawan sangat berperan dalam meningkatkan kesan positif kepada publik. SPIP wajib dilaksanakan dengan tepat karena efektifitasnya merupakan salah satu standar penilaian utama yang digunakan oleh BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Dilihat dari kondisi ini, besar harapan bahwa sistem pengendalian internal yang tepat mampu menghadirkan pengendalian yang memiliki tanggung jawab yang tinggi akan pengelolaan dana bansos (UU Nomor 15 Tahun 2004).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh unsur-unsur SPIP terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) telah dilakukan. Menurut Mandasari dkk (2022), indikator SPIP memiliki dampak yang besar dalam pencegahan fraud pada manajemen dana bantuan sosial. Studi yang dilakukan oleh Zarlis (2018) juga menemukan bahwa unsur-unsur SPIP baik itu dengan cara yang serentak maupun sebagian-sebagian memiliki pengaruh yang besar saat mencegah

penyalahgunaan jaminan kesehatan. Di sisi lain, riset Marasabessy (2016) menunjukkan jika aspek-aspek yang ada pada SPIP memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah penyalahgunaan jaminan kesehatan. Namun, perolehan riset tersebut sangatlah berbeda akan riset yang dikemukakan Huda & Ardiana (2021) mereka menyatakan bahwa unsur-unsur SPIP kecuali kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian Kundoyo & Amanah (2019) juga mengatakan bahwa unsur-unsur SPIP kecuali pemantauan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menyediakan data empiris tentang pengaruh unsur-unsur SPIP pada pencegahan fraud. Besar harapan peneliti bahwa hasil dari penelitian ini mampu untuk memberikan kontribusi terutama sebagai masukan yang berharga kepada pemerintah daerah setempat sehubungan dengan pengelolaan dana bansos sekaligus menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembacanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Fraud Hexagon

Georgios L. Vousinas mengemukakan teori fraud hexagon atau disebut juga teori segi enam yang dibuat atas pengembangan teori fraud pentagon, fraud diamond, serta fraud triangle melalui pemasukan unsur atau elemen kolusi. Teori ini memiliki enam komponen, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, ego, dan kolusi (Vousinas, 2019).

Fraud

Menurut Natasia dkk (2021) fraud atau kecurangan ialah sebuah tindakan penipuan yang sengaja dilakukan sehingga mendatangkan hal-hal yang merugikan yang biasanya tidak diketahui oleh orang-orang yang memiliki kerugian serta mendatangkan hal-hal yang menguntungkan untuk orang yang melakukan kecurangan. Fraud biasanya terlaksana akibat hadirnya tekanan dalam melaksanakan kecurangan maupun tekanan untuk menggunakan peluang yang hadir diikuti dengan kebenaran atas aksi yang dilakukan

Pengendalian Internal

Pengendalian internal sebagaimana dinyatakan IAPI dalam Agoes (2017) merupakan sebuah proses yang dibentuk, diterapkan serta dijaga oleh pihak yang memiliki tanggung jawab pada sistem pengelolaan, manajemen serta personel yang lainnya guna memberikan kepercayaan yang dapat diandalkan mengenai penggapaian tujuan dalam kaitannya dengan kepraktisan serta ketepatan operasi, laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal serta ketaatan pada perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sesuai pada yang telah ditetapkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ialah sebuah prosedur mendasar yang memerlukan upaya berkesinambungan dari semua yang terlibat didalamnya guna menanamkan kepastian yang cukup guna dapat mencapai tujuan organisasi dari operasi yang tepat guna serta praktis, kredibilitas pelaporan keuangan, perlindungan harta negara, diikuti dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Bantuan Sosial

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan pengalokasian dana atau barang berwujud oleh instansi pemerintah daerah kepada perorangan, rumah tangga, golongan dan/atau masyarakat. Pemberian bantuan ini tidak konsisten dan ditujukan kepada individu tertentu dengan maksud mengurangi potensi risiko sosial.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai fondasi bagi pengendalian internal, dimana para atasan dan seluruh pegawai menjunjung tinggi tanggung jawab masing-masing dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen mengambil peran penting dalam menetapkan standar etika dan mendukung sistem informasi, pengawasan, audit dan evaluasi. Sementara itu, setiap pegawai juga harus menunjukkan dan mempertahankan keahlian atas tugas yang diberikan. Lingkungan pengendalian yang efektif bertujuan untuk memitigasi risiko tindak kecurangan dalam sebuah organisasi (Zarlis, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mandasari dkk (2022), Satria (2020), Zarlis (2018), dan Nisak dkk (2013) yang mengungkapkan bahwa lingkungan pengendalian memberikan dampak yang besar terkait pencegahan kecurangan.

H₁: Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi

Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan secara berkala dan dievaluasi oleh manajemen sesuai dengan prioritas. Proses mengidentifikasi risiko dapat mencakup prosedur penilaian. Selain itu, seseorang juga dapat memanfaatkan pertemuan manajemen, perencanaan strategis dan tinjauan hasil pemeriksaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan kerentanan. Dilakukannya pengidentifikasian penyebab risiko, menilai risiko yang substansial, dan memutuskan langkah yang tepat untuk mengelola risiko, maka tindak kecurangan dapat dikurangi (Zarlis, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mandasari dkk (2022), Satria (2020), Zarlis (2018), dan Nisak dkk (2013) mengungkapkan bahwa penilaian risiko berpengaruh besar terkait pencegahan fraud.

H₂: Penilaian risiko berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi

Kegiatan Pengendalian

Implementasi kegiatan pengendalian merupakan aspek penting dari proses perencanaan yang bertujuan untuk melaksanakan tindakan pelaporan dan akuntabilitas yang diperlukan

Kegiatan pengendalian ialah suatu komponen yang menyeluruh dari proses perencanaan, penerapan, pelaporan, serta pertanggungjawabana yang diperlukan pegawai untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mencapai hasil yang diinginkan. Kegiatan pengendalian ini diperlukan di semua tingkatan hierarki karyawan dari yang terendah hingga yang tertinggi, karena semua kegiatan seperti pengesahan, otorisasi, verifikasi, harmonisasi, pelaporan hasil kerja, dan pemeliharaan keamanan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan

kegiatan yang tepat. Kegiatan pengendalian dilaksanakan melalui panduan kebijakan yang harus ditegakkan oleh semua sumber daya manusia dalam perusahaan. Melalui kegiatan pengendalian yang efektif dan konsisten, kemungkinan tindak kecurangan dapat berkurang secara signifikan (Zarlis, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mandasari dkk (2022), Huda & Ardiana (2021), Zarlis (2018), dan Nisak dkk (2013) menyimpulkan bahwa kegiatan pengendalian memiliki pengaruh dalam pencegahan fraud.

H₃: Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi

Informasi dan Komunikasi

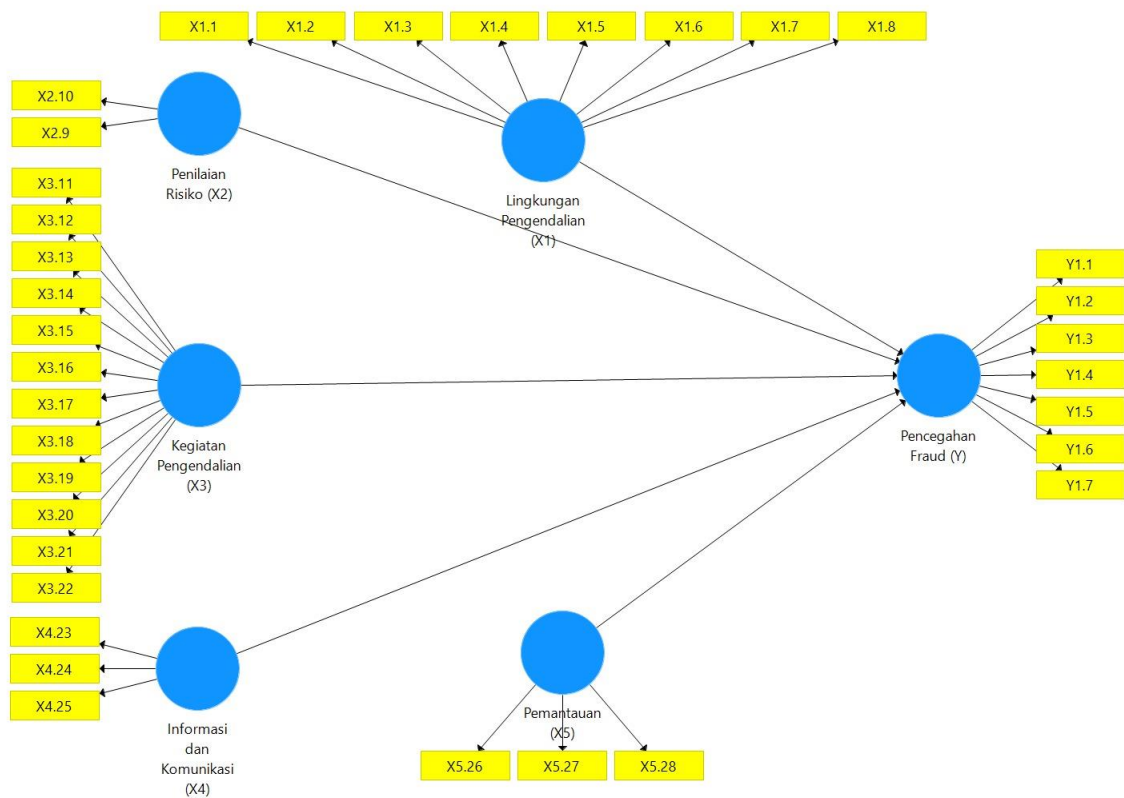
Informasi dan pertukaran informasi dalam perusahaan merupakan elemen penting yang harus diperhitungkan untuk menjamin keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan operasi bisnis. Pencapaian tujuan ini dapat direalisasikan dengan menggunakan beragam metode, seperti rapat, dokumentasi notulen, implementasi kebijakan, pembuatan manual prosedural, dan penyediaan laporan manajemen. Sangat penting untuk memastikan bahwa data didokumentasikan dan disebarluaskan dengan benar kepada pihak-pihak terkait dalam organisasi termasuk manajemen untuk memastikan bahwa semua tujuan telah tercapai. Untuk memfasilitasi ini, manajemen menciptakan sistem informasi yang memungkinkan pemrosesan transaksi yang lancar bagi pengguna. Pencegahan kecurangan dapat dihindari melalui keberhasilan implementasi strategi informasi dan komunikasi (Zarlis, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mandasari dkk (2022), Zarlis (2018), Marasabessy (2016), dan Nisak dkk (2013) menyimpulkan bahwa implementasi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh signifikan dalam pencegahan kecurangan

H₄: Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi

Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan di evaluasi secara periodik adalah salah satu cara untuk menjamin keefektifan sistem pengendalian internal yang sedang berlangsung. Studi tentang sistem pengendalian internal, laporan audit internal, dan laporan penyimpangan merupakan beberapa contoh jenis informasi yang dapat digunakan untuk penilaian dan perbaikan. Dengan pemantauan yang tepat dan berkala, maka tindak kecurangan dapat dihindari (Zarlis, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mandasari dkk (2022), Zarlis (2018), Marasabessy (2016), dan Nisak dkk (2013) menyimpulkan bahwa pemantauan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

H₅: Pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan tujuan utamanya adalah untuk menilai atau memverifikasi teori. Dalam proses ini, teori didirikan secara deduktif, berfungsi sebagai dasar untuk memastikan dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian (Indriantoro & Supomo, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini merupakan semua pegawai yang bekerja pada Inspektorat Kota Jambi berjumlah 56 pegawai. Teknik dalam mengambil sampel ialah dengan memanfaatkan *purposive sampling* dengan kriteria pegawai yang menempati struktur organisasi dan auditor. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan total 34 orang sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Metode dalam mengumpulkan data yang dimanfaatkan ialah data primer yakni kuesioner yang diberikan pada seluruh karyawan Inspektorat Kota Jambi yang menempati struktur organisasi dan auditor. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah SEM-PLS disertai oleh pemanfaatan software SmartPLS versi 3.0.

HASIL PENELITIAN
Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min.	Maks.	Rata-rata	Std. Dev
Lingkungan Pengendalian (X ₁)	34	3,00	5,00	4,07	0,47
Penilaian Risiko (X ₂)	34	3,50	5,00	4,44	0,53
Kegiatan Pengendalian (X ₃)	34	3,08	5,00	4,36	0,44
Informasi dan Komunikasi (X ₄)	34	3,67	5,00	4,43	0,45
Pemantauan (X ₅)	34	3,33	5,00	4,28	0,47
Pencegahan Fraud (Y)	34	4,00	5,00	4,39	0,41

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Evaluasi Outer Model

1. Uji Outer Loading

Tabel 2. Hasil Uji Convergent Validity (Outer Loading)

Indikator	LP (X ₁)	PR (X ₂)	KP (X ₃)	IK (X ₄)	PT (X ₅)	PF (Y)
1	0,818	0,947	0,869	0,917	0,837	0,806
2	0,832	0,970	0,830	0,830	0,843	0,799
3	0,762		0,870	0,911	0,776	0,909
4	0,919		0,721			0,921
5	0,847		0,763			0,838
6	0,795		0,833			0,810
7	0,902		0,832			0,773
8	0,726		0,799			
9			0,787			
10			0,803			
11			0,706			
12			0,740			

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa tiap-tiap indikator memiliki nilai outer loading > 0,6 dimana dapat dikatakan bahwa indikator pada penelitian ini sudah dapat melakukan pengukuran variabel lingkungan pengendalian (X₁), penilaian risiko (X₂), kegiatan pengendalian (X₃), informasi dan komunikasi (X₄), pemantauan (X₅), dan pencegahan fraud (Y).

2. Uji Cross Loading

Tabel 3. Hasil Uji Discriminant Validity (Cross Loading)

	LP (X ₁)	PR (X ₂)	KP (X ₃)	IK (X ₄)	PT (X ₅)	PF (Y)
X1.1	0,818	-0,162	0,145	0,050	0,146	0,222
X1.2	0,832	-0,234	0,138	0,666	0,311	0,366
X1.3	0,762	-0,068	0,128	0,137	0,179	0,360
X1.4	0,919	-0,104	0,197	0,094	0,266	0,387
X1.5	0,847	-0,137	0,322	0,222	0,503	0,521
X1.6	0,795	-0,212	0,238	0,065	0,230	0,039
X1.7	0,902	-0,175	0,292	0,221	0,333	0,302
X1.8	0,726	0,110	0,149	0,078	0,180	0,237
X2.1	-0,219	0,947	0,011	-0,252	-0,291	-0,138
X2.2	-0,103	0,970	0,030	-0,135	-0,313	-0,184
X3.1	0,215	-0,031	0,869	0,452	0,591	0,450
X3.2	0,349	0,118	0,830	0,298	0,445	0,374
X3.3	0,364	0,173	0,870	0,273	0,403	0,316
X3.4	0,182	-0,016	0,721	0,658	0,540	0,075
X3.5	0,191	-0,065	0,763	0,743	0,635	0,145
X3.6	0,365	-0,024	0,833	0,622	0,667	0,375
X3.7	0,237	-0,072	0,832	0,478	0,505	0,319
X3.8	-0,018	0,189	0,799	0,575	0,433	0,281
X3.9	0,151	-0,182	0,787	0,267	0,483	0,470
X3.10	0,118	0,206	0,803	0,279	0,294	0,483
X3.11	0,078	-0,204	0,706	0,695	0,598	0,270
X3.12	0,172	0,076	0,740	0,534	0,467	0,197
X4.1	0,089	-0,164	0,441	0,917	0,663	0,305
X4.2	0,161	-0,112	0,552	0,830	0,611	0,355
X4.3	0,142	-0,227	0,456	0,911	0,779	0,404
X5.1	0,259	-0,266	0,411	0,705	0,837	0,575
X5.2	0,224	-0,349	0,528	0,676	0,843	0,461
X5.3	0,377	-0,166	0,574	0,524	0,776	0,491
Y1.1	0,343	-0,183	0,376	0,420	0,531	0,806
Y1.2	0,570	-0,072	0,296	0,201	0,420	0,799
Y1.3	0,322	-0,152	0,378	0,411	0,665	0,909
Y1.4	0,373	0,009	0,401	0,338	0,490	0,921
Y1.5	0,220	-0,138	0,503	0,382	0,590	0,838
Y1.6	0,406	-0,298	0,384	0,341	0,505	0,810
Y1.7	0,411	-0,169	0,269	0,272	0,442	0,773

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa indikator penelitian dalam penelitian ini telah mampu mengukur variabel lingkungan pengendalian (X₁), penilaian risiko (X₂), kegiatan pengendalian (X₃), informasi dan komunikasi (X₄), pemantauan (X₅), dan pencegahan fraud (Y).

3. Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Lingkungan Pengendalian (X ₁)	0,945	0,934
Penilaian Risiko (X ₂)	0,958	0,913
Kegiatan Pengendalian (X ₃)	0,954	0,951
Informasi dan Komunikasi (X ₄)	0,917	0,864
Pemantauan (X ₅)	0,860	0,756
Pencegahan Fraud (Y)	0,943	0,928

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tabel 4 di atas menunjukkan perolehan pengujian reliabilitas kuesioner menunjukkan bahwa hasil angka *composite reliability* dan *cronbach's alpha* ialah < 0,7, yang berarti keseluruhan indikator pada kuesioner yang dimanfaatkan untuk mengukur variabel lingkungan pengendalian (X₁), penilaian risiko (X₂), kegiatan pengendalian (X₃), informasi dan komunikasi (X₄), pemantauan (X₅), dan pencegahan fraud (Y) dinyatakan reliabel.

Evaluasi Inner Model

1. R Square (R²)

Tabel 5. R Square

Variabel Laten	R Square	Adjusted R Square
Pencegahan Fraud (Y)	0,466	0,371

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa pencegahan fraud dapat dipaparkan melalui lingkungan pengendalian (X₁), penilaian risiko (X₂), kegiatan pengendalian (X₃), Informasi dan komunikasi (X₄), Pemantauan (X₅) sejumlah 37,1% dimana persenan yang tersisa yakni 62,9% dipaparkan melalui aspek luar yang tak tersedia pada model.

2. Q square (Q²)

$$Q^2 = 1 - (1-R_1^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1-0,371)$$

$$Q^2 = 1 - (0,629)$$

$$Q^2 = 0,371$$

Perolehan perhitungan Q² pada penelitian ini sebesar 0,371 atau 37,1%. Nilai Q² > 0 yang mengartikan bahwa model pada penelitian ini mampu dalam memberikan penjelasan atas variabel endogen yakni pencegahan fraud. Nilai Q² > 0 juga menunjukkan jika variabel eksogen pada penelitian ini mempunyai kemampuan *predictive-relevance* akan variabel endogen pada penelitian ini.

3. Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel Eksogen	Variabel Endogen	t-stat	Sig.	Ket.
H ₁	Lingkungan Pengendalian		1,704	0,089	T-stat < 1,96 and sig. > 0,05 sehingga H ₁ ditolak
H ₂	Penilaian Risiko		0,175	0,861	T-stat < 1,96 and sig. > 0,05 sehingga H ₂ ditolak
H ₃	Kegiatan Pengendalian	Pencegahan Fraud	0,441	0,660	T-stat < 1,96 and sig. > 0,05 sehingga H ₃ ditolak
H ₄	Informasi dan Komunikasi		0,693	0,488	T-stat < 1,96 and sig. > 0,05 sehingga H ₄ ditolak
H ₅	Pemantauan		2,227	0,026	T-stat > 1,96 and sig. < 0,05 sehingga H ₅ diterima

Sumber: Diolah oleh Peneliti

PEMBAHASAN

Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Pencegahan Fraud

Perolehan pengujian hipotesis dalam Tabel 6 di atas menunjukkan nilai $t_{stat} < t_{tabel}$ ($1,704 < 1,96$) dan $sig. 0,089 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga H₀ diterima dan H_a ditolak. Kondisi ini memiliki arti jika lingkungan pengendalian tidak memiliki pengaruh pada pencegahan fraud (**H₁ ditolak**). Lingkungan pengendalian mencakup berbagai faktor seperti ketentuan dan tata cara, struktur perusahaan, budaya perusahaan, serta sistem informasi.

Lingkungan pengendalian yang kuat dapat membantu mencegah *fraud* dengan memastikan bahwa proses didalamnya berjalan dengan efektif dan efisien serta meminimalkan risiko *fraud*, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa *fraud* tidak akan terjadi. Lingkungan pengendalian sebagai dasar akan pengendalian internal, ketika lingkungan pengendalian tidak mendukung maka sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi pengendalian internal lainnya dengan efektif.

Perolehan penelitian ini searah akan riset yang dilaksanakan oleh Alamsyah (2017), Fendri dkk (2018), Kundoyo & Amanah (2019), Huda & Ardiana (2021) yang menjelaskan bahwa implementasi SPIP yang mencakup unsur lingkungan pengendalian tidak mempunyai dampak yang besar dalam pencegahan kecurangan. Hal ini disebabkan karena lingkungan pengendalian lebih fokus terhadap perilaku keteladanan para pimpinan lembaga, sehingga membuat pihak pegawai rentan untuk terlibat dalam tindak kecurangan sebagai akibat dari tekanan ekonomi.

Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Pencegahan Fraud

Perolehan pengujian hipotesis dalam Tabel 6 di atas menunjukkan nilai $t_{stat} < t_{tabel}$ ($0,175 < 1,96$) dan $sig. 0,861 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga H₀ diterima dan H_a ditolak. Kondisi ini memiliki arti jika penilaian risiko tidak memberikan pengaruh pada pencegahan fraud (**H₂ ditolak**). Penilaian risiko adalah suatu proses yang kompleks dan penting dalam manajemen risiko. Proses ini melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan. Tujuan dari penilaian risiko sendiri adalah untuk

mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut.

Rencana pengelolaan dan penilaian risiko yang baik namun tidak diikuti dengan tenaga kerja yang berpengalaman tentu tidak dapat berjalan efektif. Ini menjadi salah satu alasan mengapa penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Pertimbangan besaran kapabilitas sumber daya manusia sangat penting sebab individu yang tidak mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan pada pekerjaan yang ditekuninya dapat mendorong terciptanya performa kerja yang buruk. Rencana yang dirancang untuk mengelola atau meminimalisir risiko yang berkaitan dengan sistem akuntansi dan pelanggaran prosedur relatif lebih rendah (Widyawati et al., 2019).

Perolehan riset ini sesuai akan riset yang dilaksanakan oleh Huljanah (2019), Kundoyo & Amanah (2019), Novasari & Kusumo (2022) yang mengatakan jika penilaian risiko tidak memiliki pengaruh pada pencegahan fraud. Pencegahan kecurangan dapat dicapai melalui pencapaian penilaian risiko yang baik, tetapi tidak mampu untuk memastikan jika penyalahgunaan tidak dapat terlaksana. Dengan demikian, keputusan untuk menerapkan atau mengabaikan penilaian risiko yang efektif tidak memberikan pengaruh pada pencegahan fraud.

Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Pencegahan Fraud

Perolehan pengujian hipotesis dalam Tabel 6 di atas memperlihatkan jika nilai $t_{\text{-stat}} < t_{\text{-tabel}}$ ($0,441 < 1,96$) dan $\text{sig. } 0,660 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Kondisi ini memiliki arti jika kegiatan pengendalian tidak memberikan pengaruh pada pencegahan fraud (**H_3 ditolak**). Kegiatan pengendalian adalah proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memastikan bahwa operasi mereka berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu tujuan utama dari kegiatan pengendalian adalah untuk mencegah kecurangan atau fraud. Fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan organisasi atau individu lainnya. Fraud dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Kegiatan pengendalian dapat membantu mengurangi kesempatan untuk melakukan fraud, tetapi tidak dapat menghilangkan tekanan atau rasionalisasi yang mendorong seseorang dalam melaksanakan kecurangan. Maka daripada itu, organisasi perlu untuk memiliki program pencegahan fraud yang komprehensif dan harus diterapkan dengan hati-hati serta dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian itu efektif dalam mencegah dan mengatasi fraud.

Perolehan riset ini sejalan akan riset yang dilaksanakan oleh Alamsyah (2017), Fendri dkk (2018), Kundoyo & Amanah (2019) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian tidak memberikan pengaruh pada pencegahan fraud. Kegiatan pengendalian merupakan elemen pengendalian internal yang memiliki tugas terbesar dalam mencegah terjadinya kecurangan, namun tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kecurangan. Benar bahwa perilaku curang dapat diatasi melalui kegiatan pengendalian, akan tetapi

tidak turut memberikan jaminan jika tindak kecurangan dapat dihilangkan (Yahya & Venusita, 2022).

Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Pencegahan Fraud

Perolehan pengujian hipotesis dalam Tabel 6 di atas menunjukkan nilai $t_{stat} < t_{tabel}$ ($0,693 < 1,96$) dan $sig. 0,488 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti jika informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh pada pencegahan fraud (**H_4 ditolak**). Informasi dan komunikasi yang kurang efektif bisa untuk menjadi alasan informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh pada pencegahan fraud. Informasi yang berkualitas jika tidak diiringi dengan komunikasi yang baik tentu tidak akan berhasil dalam mencegah *fraud*. Upaya pencegahan fraud memerlukan peran penting dari informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi fraud dan sangat penting untuk memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengambil tindakan yang sesuai.

Informasi yang diketahui oleh pimpinan dibandingkan dengan informasi yang diketahui oleh bawahan seringkali berbeda karena informasi yang diketahui oleh pimpinan lebih bersifat ringkas dan menyeluruh, sedangkan informasi yang diketahui oleh bawahan lebih bersifat detail dan tertentu. Informasi yang berasal dari bawahan ke atasan sering mengalami pengurangan. Terjadinya asimetri informasi dari bawahan ke atasan disebabkan informasi penting yang bersifat oportunistik yang tidak disampaikan oleh bawahan kepada atasan serta bawahan.

Perolehan riset ini sejalan akan riset yang dilaksanakan oleh Fendri dkk (2018), Huljanah (2019), Kundoyo & Amanah (2019) memaparkan jika informasi dan komunikasi tidak memberikan pengaruh pada pencegahan fraud. Persoalan ini bisa terlaksana sebab informasi keruangan yang disampaikan oleh suatu organisasi tidak valid atau relevan. Penerapan sistem informasi dan komunikasi yang efisien memang dapat berfungsi untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kehadiran sistem tersebut tidak memberikan jaminan bahwa perilaku curang tidak akan terjadi. Hal ini disebabkan karena tindak kecurangan dapat dilakukan oleh beberapa orang dan dalam melakukannya, individu atau sekelompok orang memerlukan informasi dan komunikasi (Yahya & Venusita, 2022).

Pengaruh Pemantauan Terhadap Pencegahan Fraud

Perolehan pengujian hipotesis dalam Tabel 6 di atas menunjukkan nilai $t_{stat} > t_{tabel}$ ($2,227 > 1,96$) dan $sig. 0,026 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini memiliki arti jika pemantauan memiliki pengaruh pada pencegahan fraud (**H_5 diterima**). Pemantauan merupakan salah satu unsur vital dalam mencegah terjadinya kecurangan pada suatu organisasi. Pemantauan sendiri mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan, audit, dan evaluasi kinerja yang mana semua aspek ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas pemantauan dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Adanya pengembangan atas evaluasi berkelanjutan terbukti efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini disebabkan para pelaku kecurangan juga terus mencari celah untuk melakukan kecurangan, sehingga pengendalian internal terus harus dievaluasi dan dikembangkan. Seiring dengan berkembangnya organisasi, maka aktivitas yang terlibat dalam organisasi juga

menjadi semakin kompleks. Semakin kompleks suatu organisasi, maka semakin membutuhkan evaluasi yang mendetail, sehingga pemantauan pengendalian internal perlu untuk dievaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan menunjukkan bahwa kekurangan dan kelemahan dalam pemantauan akan terus diperbaiki sehingga tindak kecurangan dapat dicegah.

Perolehan riset ini sejalan akan riset yang dilaksanakan oleh Marasabessy (2016), Fendri dkk (2018), Kundoyo & Amanah (2019), Dwiwana (2021), Yahya dan Venusita (2022) menyatakan bahwa pemantauan yang dilakukan secara berkala dan diikuti dengan evaluasi secara terus menerus dapat mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan dapat menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk keperluan di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Tugas serta tanggung jawab tiap-tiap orang yang belum dijalankan dengan baik sehingga memunculkan celah-celah untuk terjadinya fraud.
2. Penilaian risiko tidak memiliki pengaruh pada pencegahan fraud. Rencana pengelolaan dan penilaian risiko yang baik namun tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang berkompeten tentu tidak dapat berjalan efektif.
3. Kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Penerapan kegiatan pengendalian yang kurang menunjukkan tugas dan tanggung jawab yang jelas antar pegawai dapat menyebabkan pencegahan fraud menjadi kurang efektif.
4. Informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh pada pencegahan fraud.
5. Pemantauan mempunyai pengaruh pada pencegahan fraud. Evaluasi pemantauan yang berkelanjutan dapat meminimalisir dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pemantauan sehingga dapat mencegah terjadinya fraud.

Rekomendasi

1. Bagi pemerintah daerah setempat diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas manajemen, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan bantuan untuk memastikan bahwa hal tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai laporan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mempertimbangkan untuk melengkapi pendekatan atau teknik survei, seperti wawancara guna dapat memperbesar tingkat keakuratan informan saat memberikan jawaban pada seluruh pertanyaan serta menambah jumlah sampel yang akan diteliti.

PENELITIAN LANJUTAN

Keterbatasan Penelitian

1. Pengumpulan data penelitian hanya bersumber dari kuesioner sehingga kurang dapat mengumpulkan jawaban responden secara fleksibel
2. Terbatasnya jumlah sampel yang dimanfaatkan pada riset ini menyebabkan perolehan penelitian terhambat saat akan digeneralisasikan ke seluruh Inspektorat wilayah lain

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena sudah memberikan kesempatan terhadap peneliti sehingga peneliti dapat menuntaskan penulisan karya ilmiah ini sebagai bagian dari karunia-Nya. Terima kasih yang mendalam kepada Ibu Enggar dan Ibu Rahayu atas bimbingan, arahan dan saran yang bermanfaat. Kepada kedua orang tua yang secara konsisten mendoakan dan memberikan dukungan pantang menyerah di sepanjang kehidupan peneliti. Serta kepada pihak-pihak lain yang sudah memberikan kontribusinya khususnya dalam perolehan data serta informasi terkait penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Alamsyah, G. N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompensasi Terhadap Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. In *Univeristas Widyatama*.
- BPK RI. (2021a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*.
- BPK RI. (2021b). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Dwiyana, P., Kamal, B., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Kecurangan Fraud Pada PT PNM Mekar Cab. Talang, Adiwerna Dukuhturi. *Eprints Poltektegal*, 3(2), 6.
- Fendri, F. Y., Muslim, R. Y., & Yunilma. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pada SKPD Di Kota Padang. *E-Jurnal Bunghatta*, 12(1).
- Huda, N., & Ardiana, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus di Baitul Maal Wan Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UST*, 9(2), 56-66.

- Huljanah, D. N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. ANDI Yogyakarta , 2018. <https://doi.org/Nahkoda> Leadership dalam organisasi konservasi
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *APBN KITA Kinerja dan Fakta*.
- Kundoyo, & Amanah, L. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1-17.
- Mandasari, S., Sulaiman, S., & Dwitayanti, Y. (2022). Pengaruh SPIP Terhadap Pencegahan Kecurangan Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Palembang. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(8), 1125-1133. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.591>
- Marasabessy, Y. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.Iv Polda Maluku. *Jurnal Ilmu Ekonomi Advantage*, 1(5), 31-35. <https://unidar.e-journal.id/jadv/article/view/45/41>
- Natasia, B., Aprilia, D., Oktaviyanti, D., Setiawan, D., Fadila, F. N., & Meikhati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Dalam Pelaporan Keuangan. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 74-79.
- Nisak, C., Prasetyono, & Kurniawan, F. A. (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Kabupaten Bangkalan. *Jaffa*, 01(1), 15-22. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v1i1.594>
- Novasari, L., & Kusumo, W. K. (2022). Efektifitas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Antisipasi Kecurangan Dana Desa Pada Pemerintah Kabupaten Semarang. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 20(3), 254-266.
- Octavia, B. (2020). Kasus Korupsi Bansos Corona Yang Melibatkan Menteri Sosial Ditinjau Dari Moral Keutamaan. *Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*.
- PP Nomor 60 Tahun 2008. (2008). *PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

- Satria, M. R. (2020). Pengaruh Lingkungan Pengendalian Dan Penilaian Risiko Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada PSTNT Batan Bandung. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 165–169. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8515>
- UU Nomor 14 Tahun 2019. (2019). *UU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial*.
- UU Nomor 15 Tahun 2004. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.
- Yahya, F. A., & Venusita, L. (2022). The Effect Of Internal Control On Fraud Preventin Based On The Cause Factors (Empirical Study on a Construction Company in Surabaya). *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology*, 3(2).
- Zarlis, D. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Di Rumah Sakit (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta Di Jabodetabek). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 206–217. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.304>